PENGELOLAAN SAMPAH PANTAI OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)

(Skripsi)

Oleh
ANGELA CHATLYA

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

ABSTRAK

PENGELOLAAN SAMPAH PANTAI OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)

Oleh
Angela Chatlya

Sampah di pesisir Bandar Lampung menjadi masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sumber sampah di pesisir berasal dari masyarakat setempat, arus laut, dan aliran sungai yang menuju pantai. Dampak sampah di pantai Sukaraja yaitu mengakibatkan ekosistem laut, kesehatan, dan penghasilan nelayan menurun serta sering terjadi banjir. Untuk mengelola sampah di pantai Pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan LSM Mitra Bentala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah di pantai Sukaraja oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah secara kolaborasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan bersama-sama dengan LSM Mitra Bentala belum berjalan optimal. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung memfasilitasi program. Sementara, LSM Mitra Bentala menjalankan program bersih pantai seperti pembentukan kader pesisir salah satunya dipilih dari masyarakat Sukaraja, pemungutan sampah pantai, dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada para kader mengenai cara mengurangi timbulan sampah. Kader di Sukaraja hanya memungut sampah di pantai saja. Kegiatan pengurangan sampah seperti bank sampah belum dapat dibentuk kader di Sukaraja sebab rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah. Maka itu, tujuan dari pengelolaan sampah di pantai sebagai upaya penataan pesisir agar sehat dan bersih belum dapat diwujudkan di Sukaraja.

Kata kunci: Sampah di Pantai, Pengelolaan Sampah, Kolaborasi

ABSTRACT

BEACH GARBAGE MANAGEMENT BY DEPARTMENT OF CLEANLINESS AND LANDSCAPING BANDAR LAMPUNG CITY (Studies at Sukaraja Beach Bumi Waras District)

By
Angela Chatlya

Garbage in Bandar Lampung coastal is a matter which is faced by City Government of Bandar Lampung. Source of garbage in coastal are from inhabitant, sea stream and river stream to beach. The effects ofgarbagein Sukaraja beach are sea ecosystem, health, and fishers income have increased and also it engenders flood there. Hence, City Government of Bandar Lampung through Department of Cleanliness and Landscaping, makes collaboration with Mitra Bentala NGO.This research aims for knowing and analyising about garbage management in Sukaraja beach by Department of Cleanliness and LandscapingBandar Lampung.This research uses method of descriptive qualitative. The datas came from observation, interview, and documentation.

The results show that garbage managementcollaborationby Department of Cleanliness and Landscaping Bandar Lampung and Mitra Bentala NGO aren't running optimally. Department of Cleanliness and Landscaping has fasilitated the programs, meanwhile Mitra Bentala NGO is coming out the duties, such as creating the formation of coastal cadres from community, collecting the beach garbage and also coaching and trainning for cadres about how to decreasing the beach garbage. The cadre in Sukaraja only collect beach garbage. Activity of garbage management like garbage bank hasn't formed by cadre in Sukaraja because the community's concernto management garbage too low. Therefore, the purpose ofcoastal garbage management as an effort to arrangement coastal to be health and cleancan't be realized in Sukaraja.

Key words: Garbage in Beach, Garbage Management, Collaboration

PENGELOLAAN SAMPAH PANTAI OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)

Oleh
ANGELA CHATLYA

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

Judul Skripsi	:	**PENGELOLAAN SAMPAH PANTAI OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)**
Nama Mahasiswa	:	*Angela Chatlya*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1216021009
Jurusan	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.** .....

Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Angela Chatlya
NPM. 1216021009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Juli1994 sebagai putrikedua dari pasangan Bapak Wilfrid Simatupang dan Ibu Ruth Dora Nababan. Penulis memiliki satu kakak perempuan dan satu adik perempuan.Penulis merupakan isteri dari Jordy Daniel Purba dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Jericho Boaz Purba.

Jenjang pendidikan penulis dimulaidari SDXaverius Way Halim Permailulus pada tahun 2006, SMP Fransiskus Tanjung Karang lulus pada tahun 2009, dan SMA Immanuel Bandar Lampung lulus tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tulis pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016.

MOTTO

Setiap manusia memiliki kesulitan masing-masing, berusahalah dan selalu mengandalkan Yesus

Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya; apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
(Mazmur 37:23-24)

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
(Mazmur 125:5)

Harus Bisa, Harus Berani, Harus Tahu

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini kepada

BAPAK DAN IBU
Terimakasih kepada Bapakku Wilfrid Simatupang dan Ibukku Ruth Dora Nababan untuk cinta, doa, kesempatan dansemangat kepadaku.
Biarlah tulisan ini menjadi awalku mencapai cita-citaku.

PAPI DAN ANAKKU
Terimakasihkepada pasanganku Jordy Daniel Purba yang selalu menemaniku dan memberikan semangat kepadaku dan anakku Jericho Boaz Purba yang menjadi semangat hari-hariku.
Inilah yang menjadi harapan dan jawaban doa kita selama ini.

KAKAK ADIK
Terimakasih untuk kakaku Rizky Wilfrida Simatupang yang selalu memberikan semangat dan menjadi panutankudan adikku Eklesia Valentia Simatupang yang selalu memberikan aku semangat.

serta
Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuanganku di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telahmembimbing dengan sabar, memberikan kritik dan masukan yang sangat membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Siselaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orangtuaku, Bapakku Wilfrid Simatupang dan IbukuRuth Dora Nababan, terimakasih selalu memberikanku semangat ketika aku menyerah, terimakasih untuk kasih sayang, terimakasih untuk kesempatan emas ini. Aku ada hingga saat ini dan dapat menerima gelar sarjana, itu semua karena berkat Tuhan yang diberikan melalui pengorbanan dan jerih payah bapak dan ibu. Biarlah setiap doa bapak dan ibu untuk menjadikan anak-anaknya sukses dapat dijawab Tuhan. Tuhan memberkati.
9. Pasanganku, Jordy Daniel Purba, terimakasih sudah saling mengerti di saat aku sedang mengerjakan skripsi, terimakasih menemaniku riset seharian, memberikan semangat, dan mendengarkan cerita skripsi aku. Anakku, Jericho Boaz Purba, akhirnya mami selesai juga sayang kuliah di Unila. Terimakasih untuk pengertiannya Boaz jarang sakit jadi mami dapat mengikuti kuliah dan dapat menyelesaikan skripsi, terimakasih sering menemani mami ke kampus menemui dosen, ke perpustakaan, ke ruang baca, mami riset di Sukaraja liat laut, ya. Terimakasih untuk tingkahmu,

keaktifanmu, keceriaanmu, tangismu menjadi semangat mami dan selalu mami rindu.

10. Kakakku Rizky Wilfrida yang senantiasa memberikan aku semangat dan membantuku dalam penyelesaian skripsi. Semangat juga untuk menyelesaikan tesisnya kakak. Untuk adikku, Eklesia Valentia, terimakasih sudah menemaniku riset berkali-kali bersama Boaz ke Sukaraja. Semangat ya untuk UN-nya tahun depan dan dapat masuk di PTN yang top.
11. Bapak Farid Yanuza, MM dan Bapak Siswanto, S.H, MM serta staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terimakasih atas informasi dan bantuan saat Penulis melakukan penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Mashabi, Direktur Eksekutif Mitra Bentala, terimakasih atas informasi dan bantuan yang telah diberikan saat Penulis melakukan penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Imron, Bapak Sutisna, Bapak Yudi, Ibu Vivi, Ibu Hasan Basri, Ibu Siti Jubaedah, Ibu Rosdiana, Bapak Edy Suyoto, yang telah menjadi informan penelitian ini. Terimakasih untuk waktu dan informasinya saat Penulis melakukan penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Ari Hervina, Mutiara Sakinah, dan Ayu Oktaviani, sahabatku di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih untuk kebersamaan dan keceriaan, terimakasih dapat saling melengkapi dan mengerti selama empat tahun ini. Walaupun sangat sulit untuk dapat jalan berempat, pasti ada saja yang

tidak ikut, tapi biarlah persahabatan ini terus terjalin ya. Semangat menyusun skripsinya ya. Kejar gelar S.IP-nya.

15. Teman-temanku Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012, Lintang, Adel, Ubi, Yessi, Maya, Nanda,Oktanina, Ira, Putri, Eri, Dita, Arum, Nissa, Nevia, Suci, Primadya, Rizka, Astari, April, Bakti, Nugraha, Rizky Pranata, Dedek, Budi, Gunturdan teman-teman JIP lainnya, terimakasih untuk kebersamaan, keceriaan, suka-duka selama empat tahun ini. Biarlah terus terjalin kebersamaan kita ini. Sukses untuk kita semua.
16. Teman-teman KKN Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Isma, Dwi, Silvi, Ravindo, Bang Paksi, dan Bang Dani. Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kebersamaan tetap terjalin.

Bandar Lampung, 16 Juni 2016

Angela Chatlya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Manajemen Kolaborasi 11
1. Pengertian Manajemen Kolaborasi 11
2. Prinsip-Prinsip Manajemen Kolaborasi 13
3. Model-Model Manajemen Kolaborasi 14
B. Kebijakan Publik 16
C. Pemerintahan Daerah 19
1. Konsep Pemerintahan Daerah 19
2. Tujuan Keberadaan Pemerintahan Daerah 19
3. Aparatur Pemerintahan Daerah 21
D. Lembaga Swadaya Masyarakat 22
E. Tinjauan Partisipasi 25
1. Konsep Partisipasi 26
2. Fungsi Partisipasi 27
3. Macam-Macam Partisipasi 28
F. Pengelolaan Sampah 31
1. Pengertian Sampah 31
2. Jenis-Jenis Sampah 31
3. Karakteristik Sampah 32
4. Pengelolaan Sampah Padat 34
G. Konsep dan Teori Perilaku 37
1. Pengertian Perilaku 37
2. Domain Perilaku 38
H. Kerangka Pikir 43

III. METODE PENELITIAN 45
A. Tipe Penelitian 45
B. Fokus Penelitian 46
C. Lokasi Penelitian 47
D. Jenis Data 48
E. Informan 49
F. Teknik Pengumpulan Data 50
G. Teknik Pengolahan Data 51
H. Teknik Analisis Data 52

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 54
A. Kelurahan Sukaraja 54
B. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 59
C. LSM Mitra Bentala 66

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 69
A. Sampah Pantai Sukaraja 70
1. Karakteristik Sampah di Pantai Sukaraja 70
2. Sumber Sampah di Pantai Sukaraja 73
B. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja 74
C. Manajemen Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja 80
1. Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja 80
2. Program-program Pengelolaan Sampah Pantai 88
3. Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja 89
4. Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja 98

VI. PENUTUP 110
A. Simpulan 110
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Jumlah Penderita Penyakit DBD, Malaria, Diare, Pernapasan, Kulit di Puskesmas Kota Karang, Sukaraja dan Panjang Tahun 2014	3
2.	Jumlah Penderita Penyakit DBD, Malaria, Diare, Pernapasan, Kulit di Puskesmas Kota Karang, Sukaraja dan Panjang Tahun 2015	4
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	56
6.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan	58
7.	Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan	63
8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Kebersihan	63
9.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan di Kelurahan Sukaraja	78
10.	Matrik Pengelolaan Sampah di Sukaraja	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Halaman

1. Sampah di Pantai Sukaraja 71
2. Sampah yang Menumpuk di Selokan RT 10 Pantai Sukaraja..... 72
3. Pengangkutan Sampah di TPS Sukaraja 82
4. TPS Sukaraja 83
5. Pantai Sukaraja di RT 05 92

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampungdengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Kota ini terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, sehingga berdampak baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan Bandar Lampung. Di sebelah selatan Bandar Lampung memiliki wilayah pesisiryang menghadap ke Teluk Lampungdenganpanjang garis pantai 27,1 km(hasil wawancara dengan Ketua Mitra Bentala hari Senin 4 Januari 2016).Wilayah pesisir memiliki empat kecamatan yakni Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Panjang, dan Bumi Waras.

Pesisir Bandar Lampung merupakan wilayah yang sangat potensial. Pesisir menyediakan berbagai sumberdaya seperti area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata, akses industri dan pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi flora dan fauna, tepi pantai dan mineral serta sebagai persediaan air pendingin untuk instalasi industri (Yeung (2001) dalam Fauziah, dkk. 2012:1). Sebagian aktivitas Kota Bandar Lampung berada di pesisir, meliputi pemukiman, industri, perikanan tangkap, transportasi laut, militer dan pariwisata (Wiryawan, *et. al* (1999) dalam Fauziah, dkk. 2012:1).

Di balik potensi yang ada di wilayah pesisir, pencemaran wilayah ini telah menjadi isu utamayang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung (RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015).Sumber pencemaran berasal dari sampah domestik masyarakat setempat dan sampah yang dibawa oleh arus sungai dan laut dari wilayah lain terdampar di sepanjang pantai (berdasarkan risetdengan Ketua Mitra Bentala hari Senin 4 Januari 2016). Sumber pencemaran juga berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir melalui sungai yang bermuara ke laut di sepanjang pantai Bandar Lampung (Fauziah, dkk. 2012:1).

Salah satu sumber sampah yang menumpuk di pesisir Bandar Lampung dipengaruhi oleh delapan sungai. Berdasarkan penjelasan Kepala UPT Laboratorium BPPLH Kota Bandar Lampung, Ahmad Wahyudi, pada hari Rabu 6 Januari 2016,sungai yang bermuara ke Teluk Lampung yaitu Way Keteguhan, Way Kuripan Hilir, Way Sukamaju Hilir, Way Kunyit, Way Kupang Hilir, Way Lunik Hilir, Way Galih Hilir dan Way Kuala Hilir. Ketua Mitra Bentala, Mashabi, menjelaskan bahwa badan sungai dari hulu belum terjaga dengan baik sehingga sampah terbawa aliran sungai ke laut lalu menumpuk di pantai.Infrastrukturdan peraturan juga tidak ada, akibatnya sampah menumpuk di pesisir (hasilwawancara pada 4 Januari 2016).

Sampah di pesisir Bandar Lampung berdampak bagi kesehatan, lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dampak pencemaran sampah dirasakan warga Kelurahan Bumi Waras. Kondisi pesisir pantai Bumi Waras yang berserakan oleh sampah dan menggenangi air laut, mulai dari plastik hingga karung bekas

berceceran disepanjang pasir dan terombang-ambing di pinggiran laut (http://tegartv.com/2015/11/03/program-bersih-laut-hilang-sampah-menumpuk/, diakses 19 Januari 2016).Kondisi ini jelas mengancam kesehatan warga setempat. Sampah dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah, malaria, diare, gangguan pernapasan, dan gangguan pada kulit akibat dari lingkungan yang tidak bersih.

Berikut ini jumlah penderita di Puskesmas Kota Karang, Puskesmas Sukaraja dan Puskesmas Panjang yang disebabkan oleh sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penderita DBD, Malaria, Diare, Pernapasan, Kulit di Puskesmas Kota Karang, Sukaraja, dan Panjang Tahun 2014

No	Puskesmas	DBD	Malaria	Diare	Pernapasan	Kulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Karang	3	44	583	125	752
2	Sukaraja	0	43	821	7134	970
3	Panjang	16	43	656	3189	805
	Jumlah	**19**	**130**	**2060**	**10448**	**2527**

Sumber: Puskesmas Kota Karang, Puskesmas Sukaraja, Puskesmas Panjang

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 diperoleh angka tertinggi pada penderita gangguan pernapasan dengan jumlah 10.448 orang dengan penderita terbanyak berada di Puskesmas Sukaraja yaitu 7.134 orang. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih dan kondisi cuaca sehingga gangguan pernapasan menjadi penyakit yang sering terjadi. Angka penderita penyakit kulit seperti gatal-gatal juga banyak dialami masyarakat di sekitar Puskesmas Sukaraja. Hal ini disebabkan air yang tidak bersih digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari. Sementara itu, di tahun 2015 gangguan pernapasan tetap menjadi penyakit yang paling banyak diderita. Berikut ini jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penderita Demam Berdarah, Malaria, Diare, Pernapasan, Kulit di Puskesmas Kota Karang, Sukaraja, dan Panjang Tahun 2015

No	Puskesmas	DBD	Malaria	Diare	Pernapasan	Kulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Karang	9	49	521	96	612
2	Sukaraja	0	46	763	6477	736
3	Panjang	2	38	751	2532	640
	Jumlah	**11**	**133**	**2035**	**9105**	**1988**

Sumber: Puskesmas Kota Karang, Puskesmas Sukaraja, Puskesmas Panjang

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 penderita gangguan pernapasan mengalami penurunan dari tahun 2014. Meskipun mengalami penurunan jumlah penderita, tetapi tetap menjadi penyakit yang paling banyak diderita yaitu berjumlah 9.105 orang. Di samping itu, diare banyak diderita oleh masyarakat di wilayah pesisir Bandar Lampung seperti di sekitar Puskesmas Sukaraja ada 763 orang menderita diare. Diare disebabkan oleh tangan yang kotor, makanan dihinggapi lalat dan sebagainya. Apalagi jika banyak tumpukan sampah mengundang lalat untuk menghinggapi sampah kemudian hinggap di makanan yang dimakan manusia.

Selama ini, pengelolaan sampah yang kurang bijaksana mendorong masyarakat membuang sampah ke drainase dan sungai sehingga mengakibatkan banjir karena aliran-aliran air tersebut terhambat oleh sampah (Wulandari, 2014:3). Sampah mengalir dan menumpuk di pinggir pantai.Dampak sampah yang ada di sungai dirasakan oleh salah satu warga yang tinggal di dekat Way Kunyit Kelurahan Bumi Waras, Juwanda, yang diwawancarai pada Selasa 5 Januari 2016 mengatakan:

> “Kalau musim kemarau sampah menumpuk di kali sehingga menimbulkan bau. Kalau musim hujan seperti ini tidak bau karena sampah terbawa air sungai ke laut tapi kali sering mampet sebab pintu kalinya terlalu sempit sehingga.

Tidak hanya itu, sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kini kesulitan menangkap ikan di wilayah ini(http://tegartv.com/program-bersih-laut-hilang-sampah-menumpuk/, diakses 19 Januari 2016). Selain itu, sampah organik dan non-organik mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan. Seperti pernyataan Amnesty Amalia Utami, relawan Walhi Lampung yaitu:

> "Masyarakat pesisir Kota Karang menemukan banyak ikan mati di tengah wilayah Teluk Lampung. Ketika pagi hari, ikan-ikan tersebut mulai terbawa kepinggir pantai atau pemukiman masyarakat dalam kondisi mabuk. Dugaan sementara akibat dari pencemaran air laut" (http://www.saibumi.com/artikel-3140-walhi-pantau-pencemaran-teluk-lampung.html#ixzz30pHOz800,diakses 19 Januari 2016).

Dampak-dampak yang disebabkan oleh sampah menunjukkan bahwa kebersihandi Kota Bandar Lampung belum optimal sehingga berdampak pada pesisir pantai yang menjadi tempat bermuaranya sampah. Di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015 dijelaskan bahwa pelayanan SOKLI kurang efektif, karena persoalan renumerasi dan terbatasnya jumlah kontainer penampungan sampah.Pelayanan SOKLI terhadap seluruh sampah penduduk yang ada hanya menjangkau 33%. Artinya sampah diluar jangkauan SOKLI itu dibuang ke saluran drainase atau ditimbun/dibakar.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 19 pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah dan (b) penanganan sampah. Sejak tahun 2011 silam, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan LSM untuk menangani sampah pesisir. Seperti di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 6 (g) dijelaskan bahwa tugas pemerintah melakukan koordinasi antarlembaga

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkolaborasi dengan LSM dan mengikutsertakan masyarakat melakukan kegiatan bersih pantai (hasil wawancara dengan Ketua Mitra Bentala pada hari Senin, 4 Januari 2016). Target dari kegiatan ini adalah menata wilayah pesisir agar bersih dan sehat dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Wilayah pesisir yang bersih dan tertata dapat menunjang sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat (hasil wawancara dengan Ketua Mitra Bentala pada hari Senin, 4 Januari 2016).

Kegiatan bersih pantai dilaksanakan di 13 kelurahanpesisir yakni Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Karang Maritim, Pesawahan, Kangkung, Bumi Waras, Way Lunik, Sukaraja, Sukamaju, Keteguhan, dan Kota Karang. Wilayah yang memiliki jumlah sampah yang cukup padat yakni Kelurahan Bumi Waras, Panjang Selatan, Kangkung dan Sukaraja. Jumlah sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan tersebut (hasil wawancara dengan Ketua Mitra Bentala hari Senin 4 Januari 2016).

Kelurahan Sukaraja merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki penduduk yang dapat dikategorikan padat dengan jumlah 12.081 orang sehingga sampah yang dihasilkan juga banyak (Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014). Sampah pantai menjadi perhatian masyarakat Sukaraja khususnya masyarakat nelayan di wilayah ini.Pemukiman nelayanyang berada di pantai Sukaraja, dulu terkenal keindahan pasirnya, sekarang terlihat kumuh

karena sampah-sampah yang menumpuk di pinggir pantai(Sumber: http://lampost.co/berita/nelayan/kecil/di/teluk/lampung/makin/terjepit, diakses 20 Januari 2016).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Selasa 5 Januari 2016, sampah-sampah di pantai Sukaraja sudah menyatu dengan tanah. Warga merasa terganggu dengan sampah yang menumpuk di pantai. Salah satu warga berprofesi sebagai nelayan yang tinggal di Kelurahan Sukaraja, Riki menjelaskan bahwa:

> "Sampah yang ada di pantai ini bukan berasal dari warga di sini, tetapi dari atas sana, menumpuk di pinggir pantai. Sampah-sampah di sini menggangu aktivitas nelayan. Lihat saja, Mba. Banyak sekali sampah di pinggir laut.Jadi hasil tangkapan tercampur sampah. Jadi harus memisahkan ikannya dari sampah. Setiap harinya tangkapan menurun hingga 80%, Mba. Sehari hanya dapat kurang lebih 100 kilogram,kalau dapat sampai ton tidak perna. Hasilnya itu juga dibagi sebelas orang. Jadi satu orang hanya mendapat 30 ribu" (berdasarkan pra riset pada Selasa 5 Januari 2016).

Keberadaan sampah-sampah tersebut juga dirasakan salah satu nelayan di Sukaraja bernama Herman, menjelaskan bahwa sampah plastik tersebut semakin banyak di dekat perairan Teluk Lampung. Akibat pencemaran sampah itu, ikan hasil tangkapan nelayan selalu bercampur dengan sampah plastik sehingga penghasilan nelayan semakin menurun (http://www/ciputranews.com/ibu/kota/daerah/nelayan-kecil-makin-terjepit-akibat-pencemaran-laut, diakses 19 Januari 2016). Sampah yang menumpuk di pantai secara tidak langsung berasal dari para nelayan. Sampah padat dari laut tersangkut dalam jaring nelayan kemudian dibuang di pesisir pantai sehingga tidak disadari tumpukan sampah semakin banyak. Jika hal ini terus dilakukan

para nelayan, sampah-sampah yang berserakan di pantai tidak berkurang jumlahnya (http://tekno.kompas.com/read/pesisir/lampung/jadi/tempat/buang/sampah, diakses 20 Januari 2016).

Sementara itu, banjir juga menerjang pantai Sukaraja tepatnya di RT 10 lingkungan I. Banjir ini menerjang rumah dua puluh kepala keluarga. Pihak DPRD kota menuding sampah menjadi penyebab banjir di pantai Sukaraja. Sekretaris Komisi III DPRD Bandar Lampung, Muchlas E. Bastari mengungkapkan bahwa banjir di pantai Sukaraja selalu berulang dan tanpa solusi (http://www.radarlampung.co.id/lsm/digelontor/rp1,4m, diakses pada 20 Januari 2016).

Pengelolaan sampah di Sukaraja belum efektif sebab tidak ada pengelolaan sampah terlebih dahulu sebelum diangkut ke TPA Bakung. Selama ini SOKLI hanya mengumpulkan sampah dari rumah tangga ke lokasi TPS. Kemudian petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung mengangkut dari TPS ke TPA menggunakan truk (berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Bumi Waras).

Berdasarkan pra riset hari Rabu 25 November 2015, Kasi Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, Farid Yanuza, menjelaskan bahwa penduduk di Bandar Lampung setiap harinya menghasilkan sampah rata-rata 0,75 kg-1 kg. Sementara itu, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sukaraja sebanyak 12.081 orang, artinya sampah yang dihasilkan dapat mencapai 9 ton sampai 12 ton setiap harinya. Di samping itu,

gerobak sampah di Kelurahan Sukaraja hanya berjumlah delapan unit dan terdapatdua kelompok satuan petugas kebersihan yang beranggota empat orang. Selain itu, tong sampah di Sukaraja hanya berjumlah 52 buah (Profil Monografi Kelurahan Sukaraja Tahun 2014).

Berdasarkan permasalahan di atas,Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah di bidang kebersihan memiliki keterbatasan dalam menjalankan bersih pantai. Akan tetapi, kegiatan bersih pantai bersamaLSM belum optimal sebab kepedulian bersih pantai pada masyarakat Sukaraja masih rendah sehingga sampah masih menumpuk di Sukaraja. Dari uraian di atas,peneliti ingin membahas pengelolaan sampah pantai yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul "Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pengelolaan sampah pantai Sukaraja oleh DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah pantai Sukaraja oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang kebijakan pengelolaan sampah di pantai.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampungsupaya dapat mengelola sampah pantai dengan optimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Kolaborasi

1. Pengertian Manajemen Kolaborasi

Di dalam penelitian ini, sampah Pantai Sukaraja menjadi masalah atau isu yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkolaborasi dengan Mitra Bentala untuk mencari solusi dari masalah sampah pantai ini. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak pula. Pendekatan itulah yang dikenal dengan manajemen kolaboratif.

Di dalam manajemen kolaboratif, setiap elemen berpartisipasi penuh dalam pembentukan pola kerjasama dan bersedia menyumbangkan waktu, pengetahuan, keterampilan, dan informasinya atau sumber daya lainnya untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Wulandari dan Titik, 2011:35). Elemen yang terlibatberperan sesuai fungsi masing-masing untuk mencapai target.Menurut Hogue (2003) kolaborasi diartikan sebagai sebuah kerjasama seluruh pihak dan membangun konsensus untuk mencapai suatu keputusan yang bermanfaat bagi pihak yang ada di dalamnya.

Kolaborasibersifat dinamis dan independen sehingga hubungan antarpihak terjadi secara terus menerus (Sabaruddin, 2015:26).

Berbeda dengan Agranoff dan McGuire (2003) menjelaskan kolaborasi dijalankan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan seperti waktu, anggaran, dan persaingan (Sabaruddin, 2015:26).Sementara pandangan Rilley (2003) manajemen kolaborasi merupakan relasi seluruh pihak baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk menjalankan program yang disepakati. Bentuk interaksi kerjasama antara pemerintah dan organisasi non pemerintah tidak sekedar perjanjian antara keduanya, tetapi saling mengakui dan berpartisipasi secara aktif (Sabaruddin, 2015:26). Oleh karena itu, kolaborasi penting dilakukan karena masing-masing organisasi saling ketergantungan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan pengertian di atas, kolaborasi dapat disimpulkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah untuk mengatasi keterbatasan karena setiap pihak berpartisipasi menyumbangkan kemampuan yang dimiliki. Di dalam penelitian ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan LSM Mitra Bentala untuk bersama-sama menjalankan program bersih pantai. Kemampuan dan keterbatasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung dikolaborasikan dengan kemampuan LSM Mitra Bentala sehingga pantai bersih dan sehat dapat diwujudkan.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Kolaborasi

Borrini-Feyerabend, *et. al.* (2000) dalam PHKA-Dephut (2002) menyatakan bahwa dalam praktik pengelolaan kolaboratif setidaknya terdapat nilai etik dan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Mengakui perbedaan nilai, kepentingan dan kepedulian para pihak yang terlibat dalam mengelola wilayah atau kesatuan sumber daya alam, baik di luar maupun di dalam komunitas lokal;
2. Terbuka bagi berbagai model hak pengelolaan sumber daya alam selain pengelolaan yang secara legal telah ada dimiliki pemerintah atau pihak terkait;
3. Mengusahakan terciptanya transparansi dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam;
4. Memperkenankan masyarakat sipil untuk mendapatkan peranan dan tanggung-jawab yang lebih punya arti;
5. Mendayagunakan dengan saling memperkuat kapasitas dan keunggulan komparatif dari berbagai aktor kelembagaan yang terlibat. Menghubungkan keterkaitan hak dengan tanggung-jawab dalam konteks pengelolaan sumber daya alam;
6. Lebih menghargai dan mementingkan proses ketimbang hasil produk fisik jangka pendek;
7. Meraih petikan pelajaran melalui kaji ulang terus-menerus dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam (Wulandari dan Titik, 2011:36).

Dari uraian di atas prinsip-prinsip manajemen kolaborasi adalah mengakui perbedaan kepentingan, terbuka pada model pengelolaan, mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan, saling memperkuat setiap kemampuan yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat, mengutamakan proses daripada hasil, dan mengevaluasi serta memperbaiki pengeloaan yang sudah ada.

3. Model-Model Manajemen Kolaborasi

Kolaborasi merupakan strategi yang praktisi digunakan untuk meningkatkan *governance* dan melaksanakan kebijakan dalam pengaturan antarorganisasi. Agranoff dan McGuire (2003)menyajikan beberapa model manajemen kolaboratif antara lain:

1. *Jurisdiction-Based Management Model*, pada model ini pemerintah daerah membutuhkan aktor-aktor yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu.Negosiasi menjadi instrumen penting dalam model ini.
2. *Abstinence model*, di mana adanya keinginan untuk menjauhkan diri dari kolaborasi. Lembaga atau aktor di luar pemerintah memilih tidak terlibat pada semua program pemerintah terutama yang sifatnya tidak mengikat, sebagai suatu kebijakan internal;
3. *Top-Down Model*, di mana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintahan lain. Pada model ini dituntut kepatuhan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakmandirian pemerintah daerah yang selalu tergantung dengan pemerintah pusat;

4. *Donor-Recipient Model,* pada model ini melibatkan pemberi dan penerima bantuan yang didasarkan pada keterlibatan aktor dalam sistem kolaboratif yang saling tergantung melalui kontrol sistem yang dijalankan. Implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses interaksi yang berkaitan dengan administrasi penetapan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Akan tetapi semua kebijakan dibuat dengan sesuai kehendak pemerintah (*top-down*);
5. *Reactive Model,* model ini dianggap sebagai manajemen yang buruk, sebab aktor yang terlibat kadang-kadang memilih untuk berpartisipasi kadang-kadang tidak. Hal ini disebabkan keputusan yang dibuat bukan mandat dari pemerintah pusat, alasan dikotomi politik-administrasi, tidak didorong misi dalam hal layanan dasar dan infrastruktur, dan lembaga lain sudah menyediakan layanan tersebut;
6. *Contented Model,* di mana model ini menekankan strategi kolaborasi daripada aktivitas kolaborasi. Model ini bersifat oportunistik sesuai dengan preferensi pemerintah daerah itu sendiri. Kolaborasi ini dilakukan secara horizontal daripada vertikal sebab dilakukan dengan organisasi lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan (Sabaruddin, 2015:35).

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan melibatkan LSM Mitra Bentala sebagai LSM lingkungan menerapkan model *donor-recipient model.* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung berkolaborasi dengan LSM Mitra Bentala untuk mengelola sampah di pesisir salah satunya pantai

Sukaraja. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung memberikan program dan anggaran kepada LSM Mitra Bentala untuk mengelola sampah di pantai.Kemudian, LSM Mitra Bentala membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan.

B. Kebijakan Publik

James Andersonmengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2012:21). Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan publik berasal dari isu yang ada di masyarakat. Isu yang mana menjadi prioritas dipilih dan diproses oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang. Seperti menurut Carl Friedrich (1969) berpendapat bahwa:

> "Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud" (Agustino, 2008:7).

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek (https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-

implementasi-kebijakan-publik/, diakses pada 19 Januari 2016). Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa "*Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*. Kebijakan publik yang dijalankan melalui program dan kegiatan akan memberikan dampak terhadap pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan" (Suwitri, 2008:10). Pengertian program menurut Terry merupakan:

> "*A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets"*(Tachjan, 2006:31).

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. Program menjadi kegiatan dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Siagian mengemukakan bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki;
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya;
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan; dan

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan(https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/, diakses 27 Januari 2016)

Istilah kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 2004:1). Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan kepentingan yang dipengaruhi *(interest affected),* jenis manfaat *(type of benefit),* derajat perubahan yang diinginkan *(extent of change envisioned),* status pembuat keputusan *(site of decision making),* pelaksana program *(program implementers)* sertasumberdaya yang tersedia *(resources commited)* (https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/, diakses 27 Januari 2016).

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berupa program, keputusan, undang-undang, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Di dalam kebijakan publik, pemerintah dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan sama sekali apa yang menjadi keharusannya. Pemerintah harus memperhatikan tujuan dari kebijakan itu karena apa yang dilakukan pemerintah tentu berdampak bagi semua elemen. Untuk itu, pemerintah harus menyesuaikan dengan masalah dan kondisi yang dihadapi.

C. Pemerintahan Daerah

1. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Harris pemerintahan daerah (*local self-government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan untuk mengambil kebijakan), tanggung jawab dan dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi (Nurcholis, 2005:20).

2. Tujuan Keberadaan Pemerintahan Daerah

Terbentuknya pemerintahan daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiamemiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh masyarakat setempat;

2. Melatih masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri;
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini terdorong karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan;
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini didasarkan pada kerangka pikir bahwa dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada daerah, terjadi saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya untuk memisahkan diri dari pemerintah daerah menjadi kecil (Nurcholis, 2005:33).

Berdasarkan tujuan yang demikian, kinerja pemerintahan daerahakanlebih efektif dan efisien dilihat dari:

1. Kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lebih sedikit daripada yang diselenggarakan pemerintah pusat;
2. Rumitnya birokrasi, pemerintahan daerah lebih sederhana daripada diselenggarakan terpusat;
3. Pemberian pelayanan publik, pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah dan cepat;
4. Cara penyelesaian masalah, pemerintah daerah lebih cepat menyelesaikannya (Nurcholis, 2005:33).

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah daerah yaitu mengurangi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah di daerah dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, dengan adanya pemerintah daerah memperkecil keinginan daerah untuk memisahkan diri, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan negara.

Di dalam penelitian ini Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan tanggungjawab kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam menangani sampah yang ada di Pantai Sukaraja. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat leluasa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya tanpa harus bergantung terhadap pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

3. Aparatur Pemerintahan Daerah

Hanif Nurcholis (2005:29) menjelaskan bahwa:

> Semua Aparatur Pemerintah Daerah di luar Kepala Daerah yang duduk dalam birokrasi lokal. Birokrasi lokal adalah organisasi pemerintahan daerah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada lingkup daerah. Pada daerah provinsi berarti gubernur dan aparaturnya: sekretaris daerah dan bawahannya, Kepala Daerah dan bawahannya, Kepala Dinas dan bawahannya, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bawahannya. Pada daerah kabupaten/kota berarti bupati/walikota dan aparaturnya: Sekretaris Daerah dan bawahannya, Kepala Dinas dan bawahannya, Kepala Kantor dan bawahannya, Kepala Badan dan bawahannya, camat dan bawahannya, lurah dan bawahannya.

Sementara Badudu dan Zaini menjelaskan bahwa Aparatur Pemerintah Daerah dapat bekerja secara profesional dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang ada di masyarakat. Kedudukan dan tugas pokok Aparatur Pemerintahan Daerah, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah maupun Pemerintah Pusat. Aparatur Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada lingkup daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah bersangkutan maupun pemerintah pusat. Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan (Sedarmayanti, 2004:76).

Berdasarkan uraian di atas, aparatur pemerintahan daerah dapat disimpulkan sebagai seperangkat organisasi yang bekerja pada birokrasi di daerah. Organisasi-organisasi pemerintahan ini bekerja sesuai kebijakan pemerintah daerah itu sendiri dan kebijakan pemerintah pusat. Organisasi atau bisa disebut lembaga pemerintahan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah bersangkutan supaya tercapai kesejahteraan.

D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Di dalam penelitian ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkolaborasi dengan LSM lingkungan hidup yaitu Mitra Bentala untuk menangani sampah pantai Sukaraja. LSM ini membantu pemerintah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya sadar terhadap lingkungan. Penyadaran terhadap masyarakat diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat di sekitar pantai Sukaraja sehingga dapat bersama-sama menangani sampah.

Sehubungan dengan hal itu, konteks LSM dalam penelitian ini secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada

masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memeroleh keuntungan dari kegiatannya.George memaparkan bahwa banyak pihak mencoba mendfinisikan LSM didefinisikan sebagai semua organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan batasan yang demikian, tidak heran kalau serikat buruh, serikat petani ataupun ormas kaum miskin kota ikut digolongkan sebagai LSM (Kompas, 2004:41).

Eldridge dalam Gaffar (2006:212) membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungan LSM dengan pemerintah yaitu:

1. Kerjasama tingkat tinggi: pembangunan akar rumput (*high level partnership: grassroots development*) yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan dengan kegiatan pembangunan dari pada yang bersifat advokasi.
2. Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput (*high level politics: grassroot mobilization)* LSM dalam kategori ini memunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya contohnya adalah LPS, LP3ES, WALHI, YLKI, YLBHI.
3. Penguatan akar rumput (*empowerment at the grassroot)* LSM dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya.

LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Secara konsepsional LSM memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dalam hal finansial;
2. Non partisan;
3. Tidak mencari keuntungan ekonomi;
4. Bersifat sukarela;
5. Bersendi pada gerakan moral (Setyono, 2003:5).

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat didefinisikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sifat dari Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

1. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan atau pengurusnya;
2. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobi, profesi, atau orientasi tujuan yang sama;
3. Bermotif nirlaba/nonprofit (tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan).

Adapun fungsi dari LSM berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu sebagai:

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat;
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang tertentu dengan tidak berorientasi pada keuntungan dan memiliki tujuan tertentu untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

E. Tinjauan Partisipasi

1. Konsep Partisipasi

Loekman Soetrisno (1997:207) mengemukakan bahwa partisipasi merupakankerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan, yang dalam konteks ini diasumsikan bahwa rakyat mempunyai aspirasi dan nilai budaya yang belum diakomodasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian suatu program pembangunan. Yuliani (2001:66) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut:

> Partisipasi adalah setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

H.A.R.Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sementara itu, partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya (Djalal dan Supriadi, 2001:201-202).

Selanjutnya Goldsmith dan Blustain menjelaskan masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

a. Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
b. Partisipasi masyarakat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
c. Manfaat yang diperoleh dari masyarakat itu memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan (Ndraha, 2003:105).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan wujud demokrasi antara semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil untuk memberikan aspirasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian suatu program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa

semua pihak mempunyai peran masing-masing dalam pembangunan sehingga terjamin adanya kontrol dalam pelaksanaanya.

2. Fungsi Partisipasi

Setiap kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, menyangkut kepentingan masyarakat haruslah mendapatkan pengertian dari rakyatnya. Partisipasi yang dipandang sebagai model pembangunan dewasa ini tentunya memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan tersebut. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

Nasikun (2003:21) menyatakan fungsi partisipasi adalah untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta memikirkan, melaksanakan suatu program pembangunan. Dengan ikut sertanya masyarakat tentu memacu pertumbuhan pembangunan dan yang lebih penting yaitu berfungsi untuk mengajak masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi utama dari partisipasi adalah sebagai terobosan di dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dalam rangka menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab dan mempunyai rasa memiliki, dalam

merencanakan, melaksanakan serta menikmati hasil-hasil pembangunan dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Macam-Macam Partisipasi

Partisipasi menjadi model dalam pelaksanaan pembangunan, di manamasyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan dan pelaksanaan pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Partisipasi mengandung beberapa unsur penting guna terwujudnya suatu partisipasi dalam suatu organisasi atau kegiatan dalam pembangunan.

Ada tiga unsur penting dalam partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Unsur pertama bahwa partisipasi sesungguhnya bukan hanya keterlibatan jasmani tetapi suatu keterlibatan mental dan perasaan;
2. Unsur kedua adalah kesediaan membantu kelompok dengan senang dan sukarela supaya tercapai tujuan;
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab yang harus dimiliki setiap pihak yang terlibat, sehingga ada rasa "*sense of belongingness*" di setiap pihak (Nasikun, 2003:24).

Untuk memeroleh gambaran yang jelas tentang partisipasi, akan dipaparkan mengenai jenis-jenis partisipasi menurut Keit Davis yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi berupa pikiran (*psychologicalparticipation*) merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam

suatu rangkaian kegiatan karena orang atau kelompok tidak dapat terjun langsung pada kegiatan untuk mencapai tujuan bersama;

b. Partisipasi yang berupa tenaga (*physical participation*). Partisipasi ini dilakukan dengan terjun langsung pada serangkaian kegiatan dengan mengerahkan tenaga;
c. Partisipasi yang berupa keahlian (*participation with skill*) merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.
d. Partisipasi yang berupa barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
e. Partisipasi yang berupa uang (*money participation*), partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan (Nasikun 2003:26-27).

Berdasarkan partisipasi Keit Davis tersebut, jenis-jenis dari partipasi dapat berupapikiran, tenaga, keahlian, barang (material), dan uang. Apapun bentuknya jika memberikan dampak positif bagi kegiatan tertentu dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi. Semua tergantung pada pihak yang berpartisipasi sesuai dengan perannya dan kemampuan yang dimiliki.

Suatu partisipasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mutlak yaitu:

a. Waktu. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung

informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta.

b. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan "memanjakan" yang akan menimbulkan efek negatif.
c. Subyek partipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya
d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, jika belum ada maka unsur-unsur itu ditumbuhkan komunikator.
e. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil.
f. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
g. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif (Gaffar, 2003:21).

F. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya dan bersifat padat. Setiap aktivitas manusia menghasilkan sampah. Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang digunakan (Slamet, 2002:14). WHO juga mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007).

Secara umum sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non organik. Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali atau pendaurulangan (*re-using*), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/material yang tidak dapat digunakan kembali (Dainur, 1995 dalam Silalahi 2010:1). Sehubungan dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan umumnya bersifat padat.

2. Jenis-Jenis Sampah

Pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (*fume, smoke*) (Silalahi, 2010:1). Di dalam

penelitian ini, sampah padat menjadi fokus untuk dikelola. Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
    a. Sampah anorganik misalnya: logam-logam, pecahan gelas, dan plastik;
    b. Sampah Organik misalnya: sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya;
2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar
    a. Mudah terbakar misalnya: kertas, plastik, kain, kayu;
    b. Tidak mudah terbakar misalnya: kaleng, besi, gelas;
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk
    a. Mudah membusuk misalnya: sisa makanan, potongan daging
    b. Sukar membusuk misalnya: plastik, kaleng, kaca (Dainur, 1995 dalam Silalahi, 2010:1-2).

3. Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah terbagi menjadi dua belas macam yaitu:

1. *Garbage* yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air bebas;
2. *Rubbish* terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor tetapi yang tidak termasuk *garbage*;

3. *Ashes*(abu) yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik dirumah, dikantor, industri;
4. "*Street sweeping*" (sampah jalanan) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, daun-daunan;
5. "*Dead animal*" (bangkai binatang) yaitu bangkai-bangkai yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan;
6. *Houshold refuse* yaitu sampah yang terdiri dari *rubbish, garbage, ashes*, yang berasal dari perumahan;
7. *Abandonded vehicles* (bangkai kendaraan) yaitu bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api;
8. Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri-industri, pengolahan hasil bumi;
9. *Demolition wastes* yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung;
10. *Construction wastes* yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan, perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung;
11. *Sewage solid* terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengelolahan air buangan;
12. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat, zat radiokatif (Mukono, 2006 dalam Silalahi, 2010:2-3).

4. Pengelolaan Sampah Padat

Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya:

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber

   Sampah yang ada dilokasi sumber ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah). Pengelolaanya dapat diserahkan pada pihak pemerintah. Sementara itu, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua metode:

   a. Sistem duet: tempat sampah kering dan tempat sampah basah;
   b. Sistem trio: tempat sampah basah, sampah kering dan tidak mudah terbakar (Chandra, 2007 dalam Silalahi 2010:6).

2. Tahap pengangkutan

   Dari dipo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Chandra, 2007 dalam Silalahi 2010:6).

3. Tahap pemusnahan

Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode syang dapat digunakan, antara lain:

a. *Sanitary Landfill*

   Sanitary landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. *Sanitary landfill*yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat besar. Semua jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. (Kusnoputranto, 1986 dalam Silalahi, 2010:7).

b. *Incenaration*

   Incenaration atau insinerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengn menggunakan fasilitas pabrik.

c. *Composting*

   Pemusnahan sampah dengan cara proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau (Dainur, 1995 dalam Silalahi, 2010:9).

d. *Hog Feeding*

Pemberian sejenis *garbage* kepada hewan ternak (misalnya: babi). Perlu diingat bahwa sampah basah harus diolah lebih dahulu (dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit cacing dan *trichinosis.*

e. *Discharge to sewers*

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah memang baik.

f. *Dumping*

Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan, jurang atau tempat sampah.

g. *Dumping in water*

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan bahaya banjir (Mukono, 2006 dalam Silalahi, 2010:10).

h. *Individual Incenaration*

Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah pedesaaan.

i. *Recycling*

Pengolahan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau di daur ulang. Contoh bagian sampah yang dapat di daur ulang, antara lain plastik, kaleng, gelas, besi, dan sebagainya.

j. *Reduction*

Metode ini digunakan dengan cara menghancurkan sampah (biasanya dari jenis garbage) sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian di olah untuk menghasilkan lemak.

k. *Salvaging*

Pemanfaatan sampah yang dipakai kembali misalnya kertas bekas. Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit (Chandra, 2007 dalam Silalahi, 2010:10-11).

G. Konsep dan Teori Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku masyarakat dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentangkebersihan.

Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri (Notoadmodjo, 2003). Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif

tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice* (Sarwono, 2004).

Perilaku diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organismeterhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Berarti rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu (Notoadmodjo, 2003).

Kwick (1974) sebagaimana dikutip oleh Notoatmodjo (2003), perilaku adalah tindakan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Umumnya, perilaku manusia pada hakekatnya adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah mahluk hidup. Berdasarkan pengertian di atas, perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.

2. Domain Perilaku

Bentuk-bentuk perilaku terbagi menjadi ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice* (Sarwono, 2004).

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

1. Pendidikan

   Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula bagi mereka untuk menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak pengetahuan yang mereka miliki.

2. Pekerjaan

   Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Umur

   Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental), dimana pada aspek psikologi ini, taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa.

4. Minat

   Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap seseuatu. Minat menjadikan seseorang untuk

mencoba menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang mendalam.

5. Pengalaman

   Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh individu baik dari dalam dirinya ataupun dari lingkungannya. Pada dasarnya pengalaman mungkin saja menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi individu yang melekat menjadi pengetahuan pada individu secara subjektif.

6. Informasi

   Kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Wahid, dkk., 2007).

2. Sikap

Sikap (*attitude*) menurut Notoatmodjo (2005) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap juga merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan juga merupakan pelaksanaan motif tertentu. Menurut Gerungan (2002), sikap merupakan pendapat maupun pandangan seseorang tentang suatu objek yang mendahului tindakannya.

Sikap tidak mungkin terbentuk sebelum mendapat informasi, melihat atau mengalami sendiri suatu objek. Sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. Menerima *(receiving*), diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek);
2. Merespon (*responding*), memberikan jawaban bila ditanya, mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap;
3. Menghargai (*valuing*), berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah ;
4. Bertanggung jawab (*responsibility*), berarti bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi (Sembiring, 2013:28-29).

Sementara Ahmadi (2003) membedakan sikap menjadi:

a. Sikap negatif yaitu: sikap yang menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma yang berlaku dimana individu itu berada;
b. Sikap positif yaitu: sikap yang menunjukkan menerima terhadap norma yang berlaku dimana individu itu berada.

3. Praktik atau Tindakan

Tindakan adalah realisasi dari pengetahuan dan sikap suatu perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk nyata atau terbuka (Notoatmodjo, 2003). Suatu rangsangan akan direspon oleh seseorang sesuai dengan arti rangsangan itu bagi orang yang bersangkutan. Respon atau reaksi ini disebut perilaku. Bentuk perilaku dapat bersifat sederhana dan kompleks.

Dalam peraturan teoritis, tingkah laku dapat dibedakan atas sikap, di dalam sikap diartikan sebagai suatu kecenderungan potensi untuk mengadakan reaksi (tingkah laku). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu tindakan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi fasilitas yang memungkinkan (Ahmadi, 2003).

Menurut Notoatmodjo (2005), tindakan adalah gerakan atau perbuatan dari tubuh setelah mendapat rangsangan ataupun adaptasi dari dalam maupun luar tubuh suatu lingkungan. Tindakan seseorang terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Secara biologis, sikap dapat dicerminkan dalam suatu bentuk tindakan, namun tidak pula dapat dikatakan bahwa sikap tindakan memiliki hubungan yang sistematis.

Menurut Green yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005), faktor-faktor yang merupakan penyebab perilaku dibedakan menjadi tiga faktor yaitufaktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap keyakinan, dan nilai, berkanaan dengan motivasi seseorang bertindak. Faktor pemungkin atau faktor pendukung (*enabling*) perilaku yaitu fasilitas, sarana, atau prasarana yang mendukung atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat dan faktor penguat seperti keluarga, petugas kesehatan dan lain-lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan tindakan individu. Ketiganya merupakan komponen yang

saling berkaitan. Demikian juga halnya mengelola sampah pantai, apa yang dipahami dan diterima Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung, Mitra Bentala dan masyarakat akan diresponi dalam bentuk perilaku untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah pantai.

H. Kerangka Pikir

Sampah menjadi masalah yang dihadapi manusia jika tidak ditangani dengan baik. Sampah merupakan suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya dan bersifat padat. Setiap aktivitas manusia menghasilkan sampah. Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang digunakan (Slamet, 2002:14). Sampah pesisir Bandar Lampung,khususnya di pantai Sukaraja menjadi masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat sebab mengganggu aktivitas masyarakat setempat baik kesehatan, perekonomian, dan lingkungan.

Selaku instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung mempunyai tugas pokok salah satunya di bidang kebersihan. Akan tetapi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih terkendala armada dan sumber daya manusia dalam mengelola sampah pantai di Sukaraja. Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 6 dijelaskan bahwa tugas pemerintah melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkolaborasi dengan LSM lingkungan hidup untuk mengelola sampah pantai dengan program bersih pantai.

Sehubungan dengan hal itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung melibatkan LSM supaya masyarakat pantai Sukaraja juga diikutsertakan dalam program bersih pantai. Hal ini dikarenakan kebersihan pantai bukan hanya tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja, tetapi yang terutama adalah tanggungjawab masyarakat, khususnya dalam penelitian ini yaitu masyarakat pantai Sukaraja. Program ini diharapkan dapat mendorong kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:

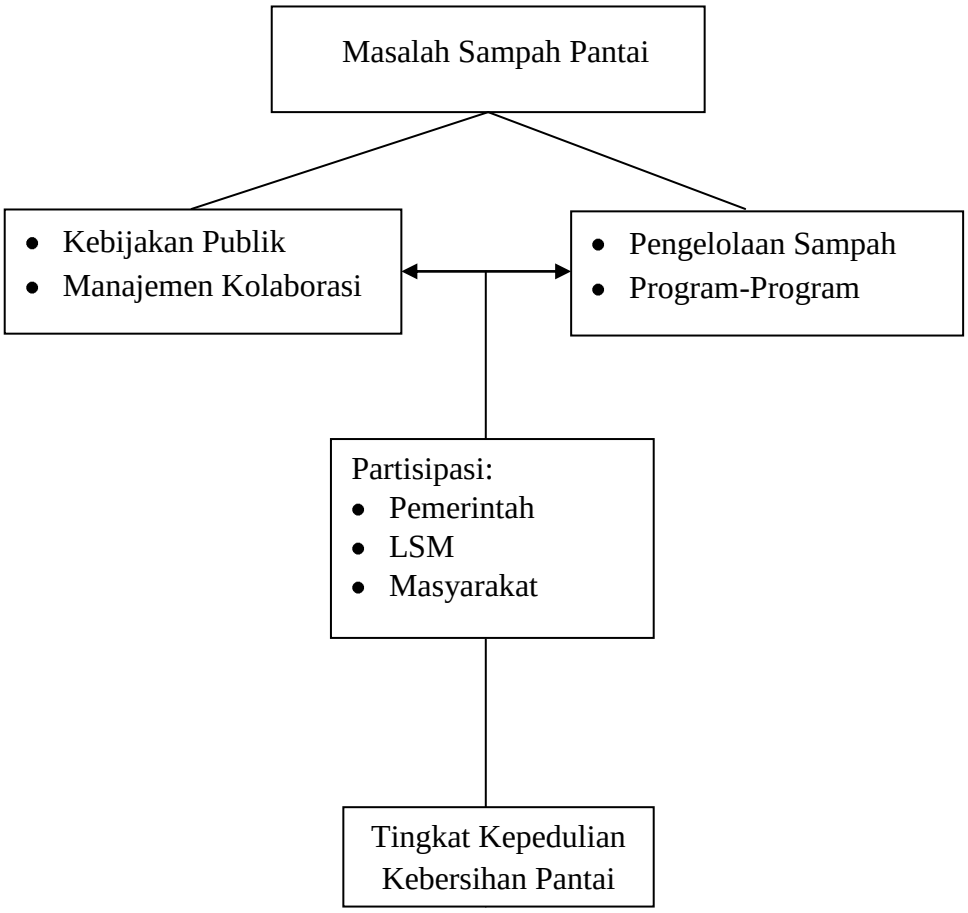

Bagan 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif yangdimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan mengikutsertakan Mitra Bentala dalam pelaksanaanya. Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:48). Oleh sebab itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masa aktual (Arikunto, 2002:36).

Sementara itu, penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007:5). Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.*Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007:5). Alasan lain dari dipilihnya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep (Sanyoto, 2012:79).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan mengikutsertakan LSM Mitra Bentala didasarkan pada persepsi, eksplorasi, pemikiran dan pengembangan konsep.Pelaksanaan penelitian ini, manusia yang menjadi instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Diharapkan sifat inilah mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama pelaksanaan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksud untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2007:237).

Berdasarkan pendapat di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengetahuipengelolaan sampah pantai yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dibantu dengan LSM lingkungan hidup yaitu Mitra Bentala serta masyarakat di pantai Sukaraja. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung selaku instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan Mitra Bentala untuk menjalankan program bersih pantai yaitu membentuk kader-kader, pemungutan sampah,pengurangan sampah dengan mengolah sampah di tingkat rumah tangga, dan kegiatan bank sampah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yaitu:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab terkait dengan masalah sampah di Kota Bandar Lampung melalui kebijakan, anggaran dan program-program menangani masalah sampah;
2. Mitra Bentala merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada lingkungan hidup di Lampung, biasanya organisasi nonpemerintah ini menggerakkan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup;
3. Pantai Sukaraja, di mana terdapat banyak pedagang ikan yang menjual dagangannya dari nelayan payangan. Sementara itu, kondisi pantai penuh

dengan tumpukan sampah dan laut sudah tercemar oleh sampah-sampah. Selain itu, Sukaraja merupakan salah satu pesisir pantai Bandar Lampung yang menjadi binaan LSM Mitra Bentala dalam menangani sampah.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu:
    1. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung;
    2. Kepala SeksiBidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung;
    3. Ketua LSM Mitra Bentala;
    4. Kader pesisir dan anggota kader
    5. Tokoh masyarakat yang ada di pantai Sukaraja Bandar Lampung.

2. Data sekunder merupakan data yang diperolehdari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu,

buku-buku, surat kabar*online*, artikelwebsite, dokumen-dokumen sepertiUU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014, Perjanjian Kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan LSM Mitra Bentala, foto-foto dokumentasi, jurnal dan referensi-referensi yang berkenaan tentang pengelolaan sampah.

E. Informan

Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Seksi Bidang Kebersihan : Bapak Farid Yanuza, MM
2. Kepala Bidang Kebersihan : Bapak Siswanto, S.H, MM
3. Ketua Mitra Bentala : Bapak Mashabi
4. Ibu RT 05/ Kader Sukaraja : Ibu Hasan Basri
5. Warga RT 05/ Anggota Kader Sukaraja : Ibu Siti Jubaedah
6. Warga RT 09/ Ketua Nelayan : Bapak Yudi
7. Ketua RT 09 : Ibu Dian Oktaviani
8. Kepala Lingkungan I : Bapak Imron
9. Ketua RT 15 : Ibu Rosdiana
10. Ketua RT 16 : Bapak Edy Suyoto
11. Ketua RT 10 : Bapak Sutisna

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi tahap sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan dikaji. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi digunakan untuk lebih mendapatkan gambaran nyata di lapangan.Peneliti melakukan observasi pada pantai Sukaraja yang tertumpuk oleh sampah. Observasi dilakukan di pantai yang berada di RT 05, RT 10, dan di payangan ikan tepatnya di RT 09 Lingkungan I Sukaraja Sementara,

2. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2001:111). Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan.

3. Dokumentasi

   Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dangan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006:104). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan *Editing*

   Penulis memeriksa hasil wawancara dengan para narasumber untuk menjamin validitasnya agar data dapat digunakan ke proses selanjutnya.

2. Tahapan Interpretasi

   Data yang didapat penulis dari hasil wawancara dan dokumentasi dideskripsikan melalui penjelasan-penjelasan sehingga dapat diinterprestasikan unutk ditarik kesimpulan sebagai hal penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi supaya data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun langkah dalam menganalisis data antara lain:

1. Reduksi Data

   Penulis memilih data-data yang akan digunakan untuk dianalis terutama data primer yang bersumber dari wawancara dipilh kembali mana yang akan digunakan dan mana yang sama sehingga dalam penganalisisan dapat dilakukan secara sederhana dan mudah dengan adanya data-data yang diorganisir.

2. Penyajian Data

   Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian tersebut kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atau bertindak berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

   Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak pengumpulan data, meskipun masih sangat bersifat sementara. Pada permulaan

pengumpulan data peneliti mulai mengeksplorasi semua hal yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dilakukan sebagai tinjauan ulang pada catatan yang ada sebelumnya (Miles dan Huberman, 1992:18).

IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kelurahan Sukaraja

1. Gambaran Umum Kelurahan Sukaraja

Kelurahan Sukaraja merupakan bagian wilayah Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Sebelumnya Kelurahan Sukaraja berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Akan tetapi, tahun 2012 terjadi pemekaran sehingga Kelurahan Sukaraja berada di Kecamatan Bumi Waras dengan luas 80,3 ha/m².Wilayah Sukaraja memiliki daerah pantai 5 ha.Di samping itu, Kelurahan Sukaraja terdiri dari dua lingkungan. Kedua lingkungan ini dipisahkan dengan Jalan Yos Sudarso. Lingkungan I berada di daerah pantai terdiri dari 17 Rukun Tetangga (RT), sedangkanlingkungan II terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT) (Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014).

Secara administratif, Kelurahan Sukaraja memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Garuntang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Way Lunik

- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras (Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014)

2. Kependudukan

Di dalam Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014 jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di Kelurahan Sukaraja sebanyak 3.177 KK. Adapun distribusi penduduk Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-Laki	5.690	47,09%
2	Perempuan	6.931	52,91%
	Jumlah Total	**12.081**	**100%**

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sukaraja adalah 12.081 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 5.690 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 6.931 jiwa. Penduduk di Kelurahan Sukaraja didominasi oleh penduduk perempuan 52,91%. Penduduk laki-laki tidak berbeda jauh jumlahnya dengan penduduk perempuan yaitu 47,09%.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum Sekolah	196	171	367	3,03%
2	TK	459	558	1.017	8,41%

3	SD/ Sederajat	1.132	2.175	3.307	27,37%
4	SMP/ Sederajat	1.583	1.740	3.323	27,50%
5	SMA/ Sederajat	2.056	2.027	4.083	33,79%
6	D1/ Sederajat	83	80	163	1,34%
7	D2/ Sederajat	75	88	163	1,34%
8	D3/ Sederajat	12	10	22	0,18%
9	S1	92	81	173	1,43%
10	S2	2	1	3	0,02%
	Jumlah Total	**5.690**	**6.931**	**12.081**	**100%**

Sumber: Profil Kelurahan. Sukaraja Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas,diketahui bahwa 4.083 penduduk Sukaraja mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA/sederajat. Sementara, tingkat pendidikan S2 hanya berjumlah 3 jiwa.Penduduk perempuan banyak berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2.175 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki banyak berpendidikan sampai tingkat SMA/sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan penduduk Sukaraja masih rendah.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	**Pekerjaan**	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**	**Persentase**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Buruh Tani	231	31	262	2,84%
2	Buruh Migran	1193	3632	4.825	52,37%
3	Pegawai Negeri Sipil	53	27	80	0,86%
4	Pengrajin Industri	-	25	25	0,27%

	Rumah Tangga				
5	Pedagang Keliling	60	189	249	2,70%
6	Nelayan	1.950	-	1.952	21,16%
7	Montir	10	-	10	0,10%
8	Dokter Swasta	-	2	2	0,02%
9	Bidan Swasta	1	3	4	0,04%
10	Perawat Swasta	1	3	4	0,04%
11	Pembantu Rumah Tangga	57	325	382	4,14%
12	TNI	2	-	2	0,02%
13	POLRI	7	-	7	0,07%
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	125	14	139	1,50%
15	Pengusaha Kecil dan Menengah	40	339	379	4,11%
16	Jasa Pengobatan Alternatif	2	-	2	0,02%
17	Karyawan Perusahaan Swasta	449	322	771	8,36%
18	Karyawan Perusahaan Pemerintah	50	70	120	1,30%
	Jumlah Total	**4.231**	**4.982**	**9.213**	**100%**

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 9.213 penduduk Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras adalah pekerja. Penduduk perempuan yang bekerja berjumlah 4.982 jiwa dan penduduk laki-laki yang bekerja berjumlah 4.231 jiwa. Buruh migran menjadi pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk perempuan di Sukaraja. Sementara itu, penduduk laki-laki paling banyak bermatapencaharian sebagai

nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Sukaraja memiliki kegiatan atau aktivitas sehari-harinya sehingga untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah itu sulit dilakukan karena faktor pengetahuan dan ekonomi.

3. Prasarana dan Sarana Kebersihan

Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras memiliki sarana dan prasarana kebersihan dalam menunjang pengelolaan sampah. Adapun jumlah sarana dan prasarana di Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan di Kelurahan Sukaraja

No	Prasarana dan Sarana	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	1 lokasi
2	Gerobak Sampah	8 unit
3	Tong Sampah	52 buah
4	Satgas Kebersihan	2 kelompok
5	Anggota Satgas Kebersihan	4 orang
6	Pemulung	35 orang
7	Tempat Pengelolaan Sampah	Tidak Ada
8	Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Swadaya

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014

Berdasarkan Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2014, Kelurahan Sukaraja memiliki satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di belakang Puskesmas Sukaraja atau tepatnya di pemayangan ikan Sukaraja. Gerobak sampah yang ada di Sukaraja digunakan oleh satgas kebersihan di wilayah Sukaraja untuk mengangkut sampah rumah tangga. Ada delapan RT yang menggunakan jasa satgas kebersihan atau sering disebut SOKLIyaitu di lingkungan I yaitu RT 05, RT 12, RT 14, dan RT 16 sedangkan lingkungan II yaitu RT 02, RT 04, RT 07, dan RT 18 (berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Lingkungan I pada Kamis 18 Februari 2016) Sementara itu,tong sampah yang ada di Sukaraja dan pengelolaan sampah merupakan swadaya masyarakat.

B. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung terletak di sisi Jalan Antara Nomor 42 Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pada awalnya untuk menanggulangi sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) yang merupakan suatu organisasi yang berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung Nomor: 21/JK/1972 Jo SK Nomor: 25/HK/1973.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung Nomor: 58/B6.III/HK1975 maka organisasi Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (BPK3) dilebur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung Karang – Teluk Betung yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/006/HK/1977 tanggal 1 Februari 1977.

Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan KotamadyaDati II Tanjung Karang – Teluk Betung, di mana belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 9 ayat 2 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah junto Keputusan Mendagri Nomor 365 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, di mana kewenangan Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung di mana dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakamakan umum serta melaksanakan tugas lainnya.

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

1. Tugas Pokok

   Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan ururan pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, dekorasi kota, dan pemakaman umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

   Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Visi dan Misi

A. Visi

Dalam rangka menyelaraskan visi Kota Bandar Lampung yaitu "Terwujudnya masyarakat Bandar Lampung yang aman, nyaman, sejahtera, maju, dan modern" maka visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yaitu "Kota Bandar Lampung sebagai kota terbersih, tertata, dan, terasri."

B. Misi

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yaitu "Meningkatkan pelayanan kebersihan dan pertamanan kota yang optimal dan mencegah penurunan kualitas lingkungan."

4. Sumber Daya Manusia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan satu orang sekertaris, empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian, dua belas kepala seksi dan empat belas orang Kepala UPT serta empat belas orang Kepala Tata Usaha UPT.Salah satu tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah kebersihan. Adapun jumlah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bidang kebersihan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan

No	Uraian	PNS	Kontrak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Rayon Kebersihan	14	6	20
2	Supir	42	72	114
3	Kenek	35	172	207
4	Petugas TPA	4	19	23
5	Satgas Kebersihan	1	74	75
6	Satgas Taman	-	15	15
	Jumlah	**96**	**358**	**454**

Sumber: Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015

5. Data dan Prasarana Operasional Kebersihan

Untuk mendukungpelaksanaan tugas di bidang kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki armada untuk menangani sampah di Kota Bandar Lampung. Adapun jumlah armada yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Kebersihan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Truk Amroll	31
2	Dump Truk	76
3	Mobil Pick Up	31
4	Motor Roda Tiga	24

5	Buldozer	1
6	Excavator	1

Sumber: Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015

6. Data dan Informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, di mana daerah pelayanan meliputi 20 kecamatan dan 126 kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Cakupan pelayanan selama ini mencapai 75%. Selain itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung juga melakukan koordinasi dengan dinas lain dalam menangani masalah kebersihan di Kota Bandar Lampung, seperti:

1. Dinas Pasar Kota Bandar Lampung

   Penanggungjawab kebersihan dan ketertiban di seluruh lokasi pasar di Kota Bandar Lampung;

2. Kecamatan dan Kelurahan

   Bertanggungjawab di bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban untuk wilayah kecamatan dan kelurahan;

3. Dinas Perhubungan

Bertanggungjawab di bidang kebersihan di terminal baik darat, terminal, sungai/danau ataupun laut (Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015).

Sistem pengangkutan sampah di Kota Bandar Lampung dibagi menjadi dua sistem yaitu:

1. SOKLI mengelola sampah domestik dan non domestik jalan protokol pada masing-masing kelurahan. Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sementara;
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengelola sampah domestik dan non domestik pada jalan protokol dan pengangkutan sampah SOKLI dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung (Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015).

Permasalahan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung tidak semua terangkut ke tempat pembuangan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah. Sebagian sampah yang tidak terangkut petugas, ditimbun masyarakat, dibuang ke kali atau laut dan berbagai cara lainnya (Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015).

Di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan sosialisasi secara berkala untuk penanganan sampah dengan memperkenalkan metode 3R yaitu:

1. *Recycle*/Daur Ulang

   Pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk menghasilkan produk lain;

2. *Reuse*/Penggunaan Kembali

   Pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakan kembali untuk keperluan yang sama tanpa mengalami perubahan bentuk;

3. *Reduce*/Perolehan Kembali

   Upaya pemanfaatan limbah dengan cara memrosesnya, untuk memperoleh kembali salah satu atau lebih materi/komponen yang terkandung di dalamnya (Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015).

C. LSM Mitra Bentala

MitraBentalamerupakansalahsatuLembagaSwadayaMasyarakat (LSM) yang berdomisili di Bandar lampung. KehadiranmitraBentalasebagaisebuah LSM merupakankristalisasidari rasa kepedulian para alumni PoliteknikPertanian Lampung terhadapkekayaanalam yang dimilkiProvinsi Lampung. OrientasikegiatanMitraBentalasejakkelahirannyamembidangipersoalanlingkunganhidupdansosialkemasyarakatan.

HinggasaatiniMitraBentalamasihterusberupayauntukmembangunsinergidengan berbagaipihakdalammemborongadanyapembangunan yang berkelanjutangunamencapaikesejahteraanmasyarakat yang mandiri

(Puspitasari, 2015:65-66). Mitra Bentala merupakan lembaga anggota bentukan Walhi Lampung (Wahana Lingkungan Hidup) (walhilampung.org).

a. Visi

   Berdaulatnya masyarakat pesisir-laut dan pulau-pulau kecil Lampung dalam pengelolaan sumber daya alam secara demokratis, adil dan berkelanjutan.

b. Misi

   1. Memperkuat Mitra Bentala melalui peningkatan kapasitas personil dan lembaga;
   2. Membangun kelembagaan masyarakat pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kelesatarian ekosistem;
   3. Mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir laut dan pulau pulau kecil Lampung melalui pelibatan publik dalam mendukung pengelolaan secara demokratis, adil dan berkelanjutan.

c. Tujuan

   1. Mengurangi pengerusakan dan rusaknya ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (*mangrove*, lamun, terumbu karang);
   2. Mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam pesisir-laut dan pulau-pulau kecil Lampung yang terpadu dan berkelanjutan;
   3. Mendorong dan meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir-laut dan pulau-pulau kecil.

d. Kapasitas Lembaga

> Didalam menjalankan program-programnya Mitra Bentala didukung oleh manajemen lembaga dan personil yang memiliki kapasitas di bidang CO (*Community Organiser*), investigasi, advokasi, gender, pemetaan partisipatif, pesisir dan kelautan, kesemuanya diberdayakan melalui pelatihan dan magang di beberapa lembaga yang berkompeten (Puspitasari, 2015:66-67).

Di dalampenanganansampahpesisir, DinasKebersihandanPertamanan Kota Bandar Lampung sebagaiperpanjangantanganPemerintah Kota Bandar Lampung di bidangkebersihanmenggandengLSM MitraBentalauntukbersama-samamenanganisampahpesisir(lampost.co/berita/walhi-lampung-bantah-terlibat-penanggulangan-lingkungan-kumuh, diakses1Maret 2016). Mitra Bentala melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat supaya berpartisipasi dalam mengelola sampah pesisir. Program yang dijalankan seperti bersih pantai dan bank sampah (hasil wawancara dengan ketua Mitra Bentala hari Rabu 24 Februari 2016).

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah sampah pantai di Sukaraja yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, LSM Mitra Bentala dan masyarakat belum optimal.
2. Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam berkoordinasi dengan pihak di luar pemerintah, yaitu LSM Mitra Bentala, belum mampu menciptakan kader yang handal sehingga pengelolaan sampah di Sukaraja belum ada praktiknya.
3. Di dalam kolaborasi pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung memfasilitasi program yang dikerjakan LSM Mitra Bentala dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, makadapatdiberikan saran antara lain:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat di pantai Sukaraja mengenai jam buang sampah.

2. Sebaiknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung bersama LSM Mitra Bentala dapat membentuk bank sampah atau memberikan insentif untuk masyarakat yang mau memunguti sampah di pantai Sukaraja.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena memiliki armada untuk mengeruk sampah yang ada di pantai Sukaraja.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung merencanakan pesisir Bandar Lampung khususnya pantai Sukaraja menjadikawasan objek wisata sehingga masyarakat dapat menjaga kebersihan supaya mengundang banyak wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2008.*Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ahmadi. 2003. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (*Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Gaffar, Afan. 2003. *Partisipasi Publik dalam Era Otonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

_____. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gerungan, A.W.2002.*Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

HAR, Tilaar. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*.Jakarta: Rineka Cipta.

Jauhari, Heru. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

KOMPAS. 2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*.Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasikun, Ahmad. 2003.*Mewujudkan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Insan Cipta Media.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 2005. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sabaruddin, Abdul. 2015.*Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik (Teori, Konsep dan Aplikasi).* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarwono, W. Sarlito. 2004.*Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Setiyono, Budi. 2003. *Pengawasan Pemilu Oleh LSM*. Suara Merdeka.

Slamet, J.S.2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Spradley dan Faisal. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*.Jakarta: PT Rajawali Press.

Subagyo, Pangestu. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetrisno, Loekman. 1997. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wahab, Abdul.2004.*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahid, dkk. 2007. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Yuliani, Vera. 2001.*Visi Masyarakat dalam Berpartisipasi*. Bandung: Bina Cipta.

Dokumen

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Profil Monografi Kelurahan SukarajaTahun 2014

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015

Selayang Pandang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Fauziah, Nurul Awali, dkk. 2012. *Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Unila Press.

Wulandari dan Titik, S. 2011. *Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat.* Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia.Vol 5 No. 1. 32-50, diakses 25 Januari 2016 darihttp://jurnalsodality.ipb.ac.id/jurnalpdf/3%20Wulandari.pdf.

Skripsi

Puspitasari, Feby. 2015. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Dalam Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandar Lampung (Studi pada LSM Walhi, Watala, dan Mitra Bentala)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sanyoto, Yahnu Wiguno. 2012. *Pola Kemitraan Pemerintahan Daerah dan Swasta dalam Perspektif Good Corporate Governance (Studi Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan PT GM).* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sembiring, SM. 2013. *Perilaku Penderita TB Paru Positif dalam Upaya Pencegahan Penularan Tuberkulosis pada Keluarga di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012.* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Silalahi, DK. 2010. *Hubungan Kebersihan Perorangan Dan Pemakaian Alat Pelindung Diri Dengan Keluhan Gangguan Kulit Pada Petugas Pengelola Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*.Medan: Universitas Sumatera Utara.

Wulandari, Sekar Octa. 2014. *Manajemen Sampah Padat Di Wilayah Pesisir (Studi Pada Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung).* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Media

http://harianlampung.com/index.php?k=kawasan&i=1356-pemkot-bantu-35-pedagang-ikan-sukaraja, diakses 20 Januari 2016

https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/, diakses 19 Januari 2016 dan 27 Januari 2016

http://lampost.co/berita/nelayan-kecil-di-teluk-lampung-makin-terjepit, diakses 20 Januari 2016

http://tegartv.com/2015/11/03/program-bersih-laut-hilang-sampah-menumpuk, diakses 19 Januari 2016

http://tekno.kompas.com/read/2011/01/23/13062451/pesisir.lampung.jadi.tempat.buang.sampah, diakses 20 Januari 2016

http://www/ciputranews.com/ibu-kota-daerah/nelayan-kecil-makin-terjepit-akibat-pencemaran-laut, diakses 19 Januari 2016

http://www.haluanlampung.com/index.php/siger/9956-pemkot-wacanakan-penataan-pesisir-teluk-lampung, diakses 25 Januari 2016

http://www.saibumi.com/artikel-3140-walhi-pantau-pencemaran-teluk-lampung.html#ixzz30pHOz800,diakses 19 Januari 2016

https://yudiwahyudin2013blog.wordpress.com/2013/03/22/penanganan-kolaboratif-masalah-persampahan-di-pulau-pulau-kecil-2/, diakses 31 Mei 2016